

## **BAB IV**

### **DINAMIKA PENGARUH BENCANA TSUNAMI TERHADAP PENINGKATAN *SOFT POWER DIPLOMACY* PROVINSI ACEH**

Harold dan Margaret Sprout (1957), menganalisis tentang hubungan manusia dengan lingkungan (*Man-milieu relationship*). Menurut mereka, ada lima macam hubungan pengaruh-mempengaruhi antara dua hal ini (Manusia dan Lingkungan).<sup>1</sup> *Pertama, enviromental determinism*, dimana lingkungan mempunyai pengaruh mutlak terhadap manusia. Manusia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak lingkungan. Sebagai contoh, kesuksesan Inggris dan Jepang dalam mengatur pertahanan, mereka mengambil kebijakan sesuai letak geografis dan merupakan tuntutan lingkungan yang mengharuskan mereka bertindak demikian.

Kedua, hubungan *free-will enviromentalism*, dimana lingkungan mempunyai pengaruh kuat pada manusia, akan tetapi manusia masih mempunyai pilihan, untuk melakukan hal tersebut atau memilih melakukan hal yang lain. Dari tanda-tanda alam menuntun mereka untuk melakukan sesuatu, orang yang bijak akan dapat memperhatikan tanda-tanda ini dan akan melakukan sesuai tuntunan alam.

Ketiga, *enviromental posisibilism*, yang menganggap lingkungan sebagai matriks yang membatasi hasil operasional keputusan. Pengaruh *miliue* tergantung pada situasi dan kondisi yang meninggalkan sedikit ruang untuk memilih. Keterbatasan teknologi misalnya, keterbatasan ini akan membuat manusia mempunyai sedikit pilihan. Akan tetapi, apabila manusia melakukan pengembangan teknologi, maka pilihan akan lebih banyak.

Keempat, *cognitive behavioralism*, manusia bereaksi terhadap lingkungan sebagaimana ia mempersepsikan dan menginterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lampau. Dalam hubungan antara manusia dan lingkungan ini

---

<sup>1</sup> Abu Bakar, Eby hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri "Dari Realisme Sampai Konstrutivisme"*, Nuansa, 2011, Bandung

lebih ditentukan oleh bagaimana manusia mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya, bukan dari tuntutan lingkungan.

Kelima, *enviromental probabilism*, asumsi dasar tipe hubungan ini adalah setiap keputusan yang bersifat hipotetik. Manusia memutuskan sesuatu berdasarkan pada perilaku yang secara normal akan diharapkan terjadi.

Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan, kesuksesan manusia akan lebih baik jika bertindak sesuai dengan kehendak alam. Baik itu mengurus tata kelola di tingkatan domestik dan juga dalam kaitannya hubungan luar negeri, termasuk juga dalam berdiplomasi. Dalam kasus Aceh, bencana tsunami mendorong pemerintah Aceh untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi alamnya. Apabila dapat dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup baik untuk manusia itu sendiri dan terutama perkembangan daerah Aceh.

Salah satu wujud dari aktivitas alam adalah terjadinya berbagai macam bencana. Sebagaimana paparan di atas tentang hubungan manusia dengan Alam, Pemerintah Provinsi Aceh telah memaksimalkan potensi alamnya dan bertindak juga sesuai dengan tuntutan alam. Dampak nyatanya pun dapat dirasakan seiring dinamika pelaksanaan hubungan dengan pihak dalam dan luar negeri. Bencana tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004, kini sudah menjadi kekuatan yang dapat digunakan dalam menarik kerjasama di dalam dan luar negeri. Untuk lebih memperjelas dinamika pengaruh bencana tsunami terhadap peningkatan *soft power diplomacy* pemerintah provinsi Aceh, maka harus dijelaskan lahirnya suprastruktur dan infrastruktur yang menjadikan provinsi Aceh mempunyai sebuah *power* baru dalam mengelola dan *manage* bencana, sejak terjadinya bencana tsunami, sehingga kemampuan ini bisa menjadi kekuatan dan daya tarik dalam menjalin kerjasama dengan luar negeri.

Pengalaman manusia dalam merespon perubahan fisik lingkungan yang menjadi penopang kehidupan mereka, telah mendorong masyarakat untuk berinovasi mengembangkan strategi yang kelak menjadi modal pengetahuan mereka. Faktor yang berpengaruh dalam hal ini selain kemampuan pengamatan manusia sebagai subyek pengetahuan, juga dipengaruhi oleh introduksi

pengetahuan dari pihak luar yang sangat berperan dalam program pembangunan dan rehabilitasi.<sup>2</sup>

Sebagai suatu respon yang bersifat adaptif terhadap perubahan baik internal maupun eksternal, sistem pengetahuan lokal bilamana dikombinasikan dengan pemahaman dalam konteks yang lebih luas dalam pembangunan berkelanjutan dapat bernilai penting untuk mengurangi dampak bencana. Sistem pengetahuan ini tidak hanya merupakan hal-hal yang diketahui oleh manusia, namun juga apa yang mereka terapkan dan mereka yakini yaitu kepercayaan, nilai, persepsi dan pandangan umum. Oleh karena itu, melalui kombinasi dari praktek lokal serta pengembangan pengetahuan yang ilmiah dapat diilustrasikan upaya adaptasi terhadap bencana yang tepat dengan kebutuhan lokal dan dapat menjadi contoh yang baik untuk wilayah lain di dalam maupun luar negeri.<sup>3</sup>

Dalam konteks Pemerintahan Provinsi Aceh, tentu sangat relevan jika membahas tentang kemampuan pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana tsunami. Banyak tindakan adaptif yang dilakukan setelah bencana tsunami guna bangkit dari keterpurukan dan kemudian mempersiapkan sedemikian rupa baik itu dari segi perundang-undangan juga infrastruktur, yang mana di kemudian hari segala aktifitas ini akan berguna bagi provinsi Aceh sendiri dan juga pihak asing. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak Aceh ini (pemerintah Aceh), akan memberikan daya tarik bagi banyak pihak asing untuk berkerjasama dengan Aceh. Hal ini yang kemudian dipahami bahwa kemampuan Aceh dalam mengelola/penanggulangan bencana dari bencana tsunami akan meningkatkan *soft power diplomacy* Aceh di tingkat lokal juga luar negeri.

Untuk menjelaskan skema peningkatan kemampuan ini, maka terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa indikasi yang membuat pemerintah Provinsi Aceh mempunyai kemampuan lebih dalam hal penanggulangan bencana, yang mana kemampuan ini dapat “dikapitalisasikan” untuk kepentingan daerah Aceh sendiri.

---

<sup>2</sup> Elok Mulyoutami, *Pelibatan Pengetahuan Lokal dalam kesiapsiagaan bencana*, World Agroforestry Centre (ICRAF), Hal 96

<sup>3</sup> Ibid

### A. Tata Ruang Yang Lebih Baik Pasca Bencana Tsunami

Sebelum terjadi bencana tsunami pada tahun 2004, tidak ada pertimbangan tentang bencana tsunami dalam merancang tata ruang kota dan rencana wilayah (RTRW) di Provinsi Aceh, padahal beberapa daerah di Aceh berbatasan langsung dengan laut Andaman, yang setiap saat bisa terancam jika terjadi gempa dan tsunami. Setelah terjadi bencana gempa dan tsunami, baru kemudian gempa dan bencana tsunami merupakan salah satu pertimbangan yang besar dalam penataan kota dan rencana wilayah.

Untuk menelaah tentang tata ruang di Aceh, bisa dilihat dari Qanun kota Banda Aceh No. 3 tahun 2003 tentang RTRW kota Banda Aceh tahun 2002-2003 dan juga Qanun kota Banda Aceh tahun 2009 tentang RTRW tahun 2009-2019. Kedua Qanun ini bisa mewakili untuk mengkaji perkembangan peraturan tentang penataan ruang oleh pemerintah Kota Banda Aceh sebelum dan sesudah tsunami.<sup>4</sup>

**Tabel IV. Perbandingan RTRW berdasarkan Qanun yang diterbitkan sebelum dan sesudah tsunami<sup>5</sup>**

Aspek Tinjauan	Qanun No. 3 tahun 2003 (Sebelum tsunami)	Qanun no. 4 tahun 2009 (Setelah Tsunami)
Jumlah Pusat Kota (CBD)	1 (BWK Pusat Kota)	2 (PK)
Jumlah sub-PK (Sub-CBD) dan Pusat Lingkungan	3 Sub-BWK	2 Sub-CBD (Sub-PK) dan 9 Pusat Lingkungan
Konsep Bencana Tsunami	Tidak ada	Ada
Jalur Evakuasi	Tidak ada	Ada, masuk dalam struktur ruang
Penetapan sabuk Hijau	Tidak ada	Ada
Jenis Bencana yang disebutkan	Abrasi dan Banjir	Gelombang Pasang, banjir dan tsunami
Estimasi penduduk dan	307.695 jiwa dengan	482.131 jiwa dengan

<sup>4</sup> Qanun kota Banda Aceh digunakan sebagai sample karena kota Banda Aceh salah satu daerah dengan dampak kerusakan terparah akibat terjangan gelombang tsunami, selain itu Banda Aceh adalah wilayah dengan penduduk terpadat di provinsi Aceh

<sup>5</sup> Syamsidik dan Suhada Arief, Kajian Dampak Tsunami terhadap perkembangan tata ruang di Aceh sebelum dan sesudah tsunami tahun 2004, Tsunami dan Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), hal 196

kepadatan di akhir masa berlaku RTRW	kepadatan penduduk 31-100 jiwa/km <sup>2</sup> di akhir tahun 2010	kepadatan penduduk 78 jiwa/km <sup>2</sup> untuk akhir tahun 2019
--------------------------------------	--	---

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana tsunami telah melahirkan rancangan tata ruang yang lebih baik daripada sebelum tsunami. Dalam rangka pengawasan penduduk juga dikelola dengan lebih baik, yang mana untuk kawasan yang memiliki resiko bencana tsunami akan dikurangi tingkat kepadatannya. Selain itu konsep mitigasi bencana juga diatur lebih baik. Mitigasi bencana tsunami, banjir dan juga gelombang pasang telah diatur lebih jelas, ditambah dengan beberapa infrastruktur pendukung dalam proses evakuasi.

### **B. Infrastruktur Pendukung Manajemen Bencana Tsunami di Aceh**

Bencana Tsunami adalah salah satu bencana alam yang memberikan dampak kerusakan yang sangat besar. Akan tetapi, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tsunami, antara lain :

- 1) Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami atau pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko
- 2) Pembangunan tempat-tempat evakuasi yang cukup tinggi di sekitar daerah pemukiman
- 3) Pembangunan Tsunami *Early Warning System* (Sistem Peringatan Dini Tsunami)
- 4) Penyiapan rencana, peralatan dan personil kedaruratan serta penyiapan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat perlu mengenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami.<sup>6</sup>

Setelah bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam, Provinsi Aceh mulai berbenah dan membangun kembali bangunan-bangunan yang sempat diporak-porandakan oleh gelombang tsunami. Selain itu, ada beberapa bangunan dan instrumen khusus yang dibangun sebagai respon terhadap bencana tsunami.

<sup>6</sup> NOAA, 1995, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010, diambil dari artikel karya danang Priatmojo yang berjudul “*Penataan Kota bermuatan Antisipasi Bencana*”, Hal 91

Pemerintah provinsi yang bersinergi dengan pemerintah pusat dan juga beberapa pihak asing membangun bangunan untukantisipasi jika sewaktu-waktu bencana serupa kembali terjadi. Bangunan dan instrumen tersebut antara lain adalah *Escape Buliding* dan *escape road*, sirine peringatan tsunami dan *Tsunami and Disaster Mitigation Research Center* (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

### **1. Escape Buliding dan Escape Road**

*Escape building* adalah salah satu bangunan penyelamatan yang dibangun pasca tsunami. Tiap-tiap *escape building* dibangun dengan luas 1.400 meter persegi. Bangunan ini tahan akan guncangan gempa hingga 10 skala Richter. Bangunan ini juga kuat dengan 54 pilar yang mempunyai diameter masing-masing 70 sentimeter. Tinggi gedungnya sekitar 18 meter dengan 4 lantai. Lantai akhir dibiarkan terbuka dan tersedia helipad untuk pendaratan helikopter. Lantai dua mempunyai tinggi sekitar 10 meter, mengikuti tinggi gelombang tsunami Desember 2004 lalu di lokasi gedung tersebut. Sementara lantai satu dibiarkan kosong tanpa partisi, asumsinya untuk menghindari terjangan air tsunami. *Escape buliding* dibangun berkat kerjasama pemerintah daerah dengan pihak Jepang dan juga didanai oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.

Sejak bangunan ini dibangun, sudah dilakukan beberapa kali simulasi penyelamatan dari bencana tsunami. Masyarakat Aceh, terutama masyarakat yang berada di area rawan bencana tsunami seperti di kecamatan Meuraxa, sudah sangat paham dengan mekanisme penyelamatan jika bencana kembali terjadi. Untuk menunjang kesempurnaan fungsi *escape building* ini, dibangun pula *Escape Road* yang merupakan pendukung sebagai sarana penyelamatan yang maksimal.

Secara teori, *escape building* tahan gempa dan juga gelombang tsunami. Dengan konsep bangunan seperti ini, tentu pemerintah Provinsi Aceh dan juga masyarakat sudah lebih siap dan paham cara penyelamatan dari bencana. *Escape building* bukanlah satu-satunya bangunan anti gempa di Aceh, ada juga bangunan-bangunan lain yang didesain agar tahan gempa dan tsunami seperti beberapa

kantor pemerintahan dan juga hermes Palace Hotel. Namun bangunan-bangunan tersebut bukan dibangun khusus sebagai bangunan penyelamatan sebagaimana fungsi *escape building*.

## 2. Sirine Peringatan Tsunami

Bangunan ini berbentuk seperti menara yang berfungsi memberi peringatan apabila berpotensi tsunami setelah terjadi guncangan gempa bumi. Di provinsi Aceh, sirine ini berada di beberapa daerah yaitu di Kantor Gubernur Aceh, Lampulo dan Blang Oi. Tiga lainnya terletak di Aceh Besar yakni Kahju, Lam Awe dan Lhok Nga.

Sirine peringatan bencana tsunami sebenarnya mempunyai sistematisa kerja yang hanya membutuhkan beberapa menit saja hingga peringatan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Dalam tiga menit pertama kekuatan gempa dan potensi tsunami sudah diketahui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Aceh dan pusat. Satu menit selanjutnya data diolah BMKG kemudian disampaikan ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di Aceh. Pusdalops dalam kurun satu menit usai data itu diperoleh sudah berhasil mendeteksi titik-titik yang akan diterjang tsunami. Petugas Pusdalops menyampaikan laporan hasil kajian itu satu menit kemudian ke Komando Pengendalian (Kodal) dalam hal kepala pemerintahan (gubernur) atau yang mewakilinya, agar dibunyikan sirine tsunami dalam waktu sesingkat-singkatnya secara manual. Jika Kodal yang dituju tak ada, maka petugas bisa memencet langsung alarm tsunami tersebut. Begitu sirine menyala masyarakat harus segera menyelamatkan diri dengan mencari tempat lebih tinggi dan aman dari tsunami.<sup>7</sup>

Bagi daerah-daerah yang ada *escape building* akan dibimbing untuk secepatnya menuju gunung penyelamatan tersebut, sedangkan untuk daerah yang tidak terdapat *escape building* akan diarahkan untuk melakukan penyelamatan ke tempat yang lebih tinggi. Sirine penyelamatan ini telah didesain dapat bekerja secara otomatis tanpa bergantung pada daya listrik, yang mana ini sangat efektif

---

<sup>7</sup>Okezonenews. Dari artikel yang ditulis oleh Salman mardira yang berjudul "Enam Sirine di Aceh Serentak Berbunyi", diakses pada 17 Agustus 2016

dan efisien mengingat biasanya setiap terjadi guncangan gempa besar maka listrik juga akan mengalami pemadaman.

### **3. *Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC)***

*Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC)* adalah lembaga riset yang profesional dan handal di bidang kebencanaan yang mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset dan juga pengembangan untuk memecahkan berbagai masalah kebencanaan, baik pada tingkat daerah, nasional dan internasional. TDMRC didirikan pada 30 Oktober 2005 di kota Banda Aceh oleh Universitas Unsyiah kuala, sebagai salah satu kontribusi nyata dalam membantu penanggulangan di bidang kebencanaan di Aceh khususnya pasca tsunami.

TDMRC juga berkontribusi meningkatkan masyarakat yang tahan bencana, berkolaborasi dengan para peneliti dan lembaga riset lainnya dalam riset-riset kebencanaan.<sup>8</sup> Berkat kontribusinya di bidang kebencanaan, TDMRC ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) binaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (kemristekdikti) tahun 2016-2018. TDMRC dinilai telah sukses memberikan pembelajaran pasca tsunami, yang mampu menjadikan Aceh tidak hanya pulih secara fisik, namun juga telah mampu membangun kapasitas pengetahuan di bidang mitigasi bencana tsunami, yang berguna di tingkat nasional hingga internasional.

### **4. Museum Tsunami Aceh**

Museum tsunami Aceh adalah sebuah museum untuk mengenang peristiwa gempa dahsyat dan gelombang tsunami di Aceh yang memakan banyak korban jiwa. Museum ini dibangun di Kota banda Aceh dengan biaya pembangunan sebesar Rp 140 Miliar, 70 Miliar dari badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-nias dan setengahnya lagi dari kementerian Energi dan Sumber daya mineral (ESDM).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dikutip dari situs resmi Tsunami & Disaster Mitigation Research Center, Syiah Kuala University Banda Aceh, Indonesia

<sup>9</sup> Diambil dari profil meseum tsunami yang berada di Banda Aceh, yang merupakan satu-satunya meseum tsunami di Indonesia dan juga dunia.

Museum tsunami bisa dikatakan sebagai bangunan yang multifungsi, museum ini bisa menjadi tempat wisata, tempat mempelajari tentang tsunami dan juga sebagai tempat penyelamatan dari bencana tsunami (*escape Roof*), yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi. Museum tsunami ini adalah museum tsunami satu-satunya di Indonesia dan juga di dunia. Tentu hal ini bisa menjadi daya tarik bagi pihak luar yang tertarik untuk mempelajari tentang tsunami terutama dalam hal penanggulangan bencana tsunami.

Dengan seperangkat fasilitas dan peraturan baru dalam pengelolaan bencana di Aceh, menjadikan provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang siap siaga dengan segala bentuk bencana, terutama untuk bencana gempa dan tsunami. Bencana alam gempa dan tsunami adalah salah satu bentuk bencana yang paling ditakuti, karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Dengan keahlian penanganan bencana ini, pemerintah luar negeri tertarik untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh. Pemerintah Istanbul (Turki) salah satu daerah di dunia tertarik melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh.

Pemerintah Istanbul tertarik berkerjasama dengan pemerintah Aceh untuk mempelajari tata cara penanggulangan bencana di Aceh, yang dianggap lebih mapan dari pada daerah lain, terutama dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami. Pemerintah daerah Aceh juga akhirnya bisa bekerjasama dengan pemerintah istambul di bidang pendidikan. Dari kerjasama ini dapat dipahami bahwa kemampuan dalam penanggulangan bencana telah membuat pemerintah Aceh mempunyai modal baru dalam aktifitas diplomasi antara pemerintah daerah ataupun dengan organisasi internasional, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Bencana tsunami telah menuntun pemerintah Aceh untuk berbenah dan menjadikan tata kelola daerah yang lebih baik, terutama lebih responsif terhadap bencana alam. Banyak daerah-daerah lain di dunia yang tidak mempunyai kemapanan dalam hal penanggulangan bencana, mungkin karena anggapan bahwa daerahnya tidak pernah dilanda bencana alam dengan tensi yang cukup parah. Berbeda dengan pemerintah Aceh yang telah dilanda bencana tsunami, yang merupakan salah satu bencana alam terdahsyat pada abad ini. Sehingga

menyadarkan akan pentingnya kesiapan dalam membuat tata kota dan wilayah yang responsif terhadap bencana alam, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh pemerintahan provinsi Aceh.

Bencana tsunami telah melahirkan sebuah modal baru bagi pemerintahan Aceh dalam aktivitas diplomasinya di tingkat internasional. Kerjasama kemanusiaan maupun kerjasama di bidang penanggulangan bencana akan membuahakan kerjasama dibidang-bidang lain seperti di bidang pendidikan, ekonomi dan juga teknologi.

### **C. Wewenang Yang Luas Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Aceh**

Dengan adanya infrastruktur yang mendukung penanggulangan bencana dan segenap peraturan baru dalam tata kota dan wilayah di Provinsi Aceh, yang kemudian dapat “dikapitalisasikan” dalam aktifitas diplomasi di tingkat lokal maupun internasional, dengan didukung oleh regulasi dari pemerintah pusat (Indonesia) yang memberikan wewenang yang cukup luas bagi pemerintah Aceh. Salah satu kesuksesan di balik tragedi tsunami adalah diplomasi penyelesaian kasus dalam negeri (GAM dan RI) di Helsinki. Pasca terjadinya bencana tsunami dan ditandatanganinya perundingan damai di Helsinki, ada beberapa perubahan mendasar yang terjadi di Provinsi Aceh, terutama dari segi regulasi yang membuat Aceh menjadi lebih leluasa dalam melakukan hubungan luar negeri. Regulasi tersebut antara lain adalah :

1. Undang-Undang no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

Undang-undang ini memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengelola pemerintahan di Aceh termasuk dalam memaksimalkan potensi regional untuk meningkatkan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan umat.

2. Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang pelabuhan bebas di Sabang dan perdagangan bebas

Undang-undang ini juga memberikan wewenang yang sangat luas bagi pemerintah Aceh dalam mengelola potensi alamnya, terutama di kawasan Sabang.

Pemerintah mempunyai otoritas yang cukup luas untuk mengelola pajak dan aktivitas import.

3. Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang kerjasama antara pemerintah Aceh dengan institusi luar negeri<sup>10</sup>

Peraturan ini memberikan otoritas yang cukup luas bagi pemerintah Aceh untuk menjalin hubungan luar negeri, terutama dalam urusan pembangunan ekonomi. Seperangkat regulasi ini merupakan indikasi penting peningkatan kekuatan dalam hubungan luar negeri Aceh terutama dalam berdiplomasi dengan berbagai pihak, terutama dalam kerjasama luar negeri.

Setelah terjadi bencana tsunami, Provinsi Aceh mengalami perubahan yang besar, meliputi kondisi politik dan juga tata kelola masyarakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa provinsi Aceh terjebak dalam dinamika politik yang sulit dengan pemerintah pusat dalam bingkai separatisme selama 30 tahun lebih. Bencana tsunami menjadi titik balik perubahan kondisi provinsi Aceh. Bencana tsunami telah “menginternasionalisasikan” kondisi Aceh, maka kemudian kepedulian pihak asing terhadap kondisi Aceh mendorong percepatan perdamaian guna pembangunan kembali Provinsi Aceh pasca konflik dan bencana tsunami.

Perubahan kondisi Aceh dimulai dengan perundingan perdamaian RI dan GAM di Helsinki, kemudian dilanjutkan pembangunan infrastruktur-infrastruktur penting yang merespon bencana tsunami ditambah tata kelola kota dan wilayah yang semakin baik dan responsif terhadap bencana. Kondisi ini membuat pemerintahan provinsi Aceh menjadi lebih dewasa, terutama dalam manajemen bencana. Kemampuan dalam manajemen bencana dapat dikapitalisasi (dibagi) dengan pihak lain di dalam dan luar negeri. Kemampuan inilah yang kemudian melahirkan kekuatan yang bisa dipergunakan dalam aktivitas diplomasi oleh pemerintahan Aceh. Kekuatan ini yang dipahami sebagai *soft power diplomacy* bagi pemerintahan Aceh, yang dapat melahirkan kerjasama-kerjasama, tidak hanya di bidang kebencanaan melainkan juga untuk bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi, pendidikan dan juga teknologi.

---

<sup>10</sup> Dikutip dari selebaran yang buat oleh pemerintah Provinsi Aceh dalam meromosikan daya tarik investasi di Aceh

Berkat peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh Provinsi Aceh dengan pihak luar negeri, peningkatan juga dialami dibidang investasi yang meningkat drastis, yang mencapai ratusan kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum bencana tsunami. Bencana tsunami dengan segenap hikmah dibalikinya, telah memberikan *angin segar* kepada masyarakat Aceh, setelah sebelumnya ditimpa oleh bencana dan konflik berkepanjangan. Bencana tsunami menjadi titik awal kebangkitan Provinsi Aceh dari segi kerjasama dan juga investasi.

Berkat kuantitas dan kualitas diplomasi yang semakin baik, Pemerintah Aceh bisa terus meningkatkan intensitas kerjasamanya dengan luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Luar Negeri No. 37 tahun 1999 memuat : daerah dapat bekerjasama langsung dengan lembaga profit di luar negeri. Untuk menunjang peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri, Departemen Luar Negeri melalui perwakilan di luar negeri telah mengadakan berbagai kegiatan untuk menarik masuk investasi asing dan meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri.

Peluang-peluang Kerjasama Luar Negeri dengan Negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia meliputi bidang ekonomi dan sosial budaya. Peluang tersebut di antaranya :

- Perdagangan
- Investasi
- Ketenagakerjaan
- Kelautan dan perikanan
- Ilmu pengetahuan dan teknologi
- Kehutanan
- Pertanian
- Pertambangan
- Kependudukan
- Pariwisata
- Lingkungan hidup
- Perhubungan
- Pendidikan

- Kesehatan
- Kewanitaan
- Olahraga
- Kesenian
- Kepemudaan

Drs. Amnal Rachman telah menyampaikan juga bahwa Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa membawahi tiga organisasi regional yang cukup aktif dan merupakan wacana yang sangat baik bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri bagi pemerintah daerah.<sup>11</sup> Tiga organisasi regional tersebut adalah :

1. *Asia Europe Meeting* (ASEM), yang terdiri dari 43 negara yang mempunyai tiga pilar, yaitu ekonomi, politik dan pendidikan. Pemerintah dapat melakukan kerjasama di bidang-bidang tersebut.
2. Uni Eropa (EU), yang beranggotakan 28 negara yang merupakan salah satu pasar utama produk-produk Indonesia. Selain itu Uni Eropa merupakan investor terbesar utama di Indonesia karena di kelompok ekonomi terdapat negara-negara maju, seperti Jerman, Itali, Spanyol, Prancis dan Inggris.<sup>12</sup> Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam segala bidang dengan melakukan konsultasi dengan Departemen Luar Negeri.
3. *Forum For East Asia and Latin America Cooperation* (FEALAC), yang beranggotakan 35 negara. Beberapa peluang kerjasama dengan FEALAC adalah bidang pemberantasan narkoba, terorisme, bidang perdagangan, pendidikan dan kebudayaan, kerjasama wartawan dan kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peluang kerjasama bagi daerah semakin besar, maka dari itu dibutuhkan persiapan mekanisme dan daya tarik tersendiri bagi daerah untuk menarik pihak asing untuk bekerjasama dan juga berinvestasi di daerah tersebut.<sup>13</sup> *Multitrack*

---

<sup>11</sup> Disampaikan oleh Drs. Amnal Rachmandari Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika Dan Eropa, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, dalam kuliah Pasca Sarjana universitas Riau, yang bertemakan otonomi Daerah dan peluang Kerjasama Luar negeri

<sup>12</sup> Ketika tulisan ini dibuat, Inggris masih merupakan bagian dari Uni Eropa. Namun pada tanggal 23 Juni 2016, Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa

<sup>13</sup> Ibid

Diplomasi dalam melaksanakan politik luar negeri yang menghubungkan berbagai aktor domestik dengan aktor internasional menuntut pelaku untuk bisa mengkomunikasikan perkembangan daerahnya guna meraup keuntungan demi memenuhi kepentingan daerah. Pemerintah Aceh dengan segenap potensi yang dimilikinya, tentu memiliki daya tarik lebih bagi pihak luar negeri, namun ini juga tergantung ketrampilan dari para pelakunya dalam menggunakan potensi tersebut.